

PERANAN INKUBASI BISNIS DAN EKONOMI KELEMBAGAAN PADA PROSES PEMBENTUKAN KOPERASI WANITA PERTAMA DI DKI JAKARTA

Dicky Chandra^{1*}, Deni Adha Akbari²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: dickychandra@uhamka.ac.id¹, deni@uhamka.ac.id²

Diterima: 21 Mei 2020, Direvisi: 18 Juli 2020, Disetujui: 13 Oktober 2020

ABSTRAK

PKH mendorong KM untuk memiliki akses pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, dan program perlindungan lainnya. Namun, ternyata hasil program ini masih jauh dari yang diharapkan. Kementerian Sosial melalui kerjasama antara Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA telah memulai langkah awalnya dengan Tema "Counseling Family Development" dan menyampaikan materi "Tata Kelola Keuangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Senen". Penulis mendapatkan fakta yang ternyata berbeda. Dari 899 KPM yang diundang, hanya 47 KPM yang hadir. Sebagian besar mengakui bahwa dana bantuan sosial yang diterima digunakan untuk hal yang sifatnya konsumtif (tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh Program Pemerintah). Pendamping PKH Kecamatan Senen merespon gagasan penulis dan meminta penulis beserta tim FEB UHAMKA menginisiasi lahirnya Koperasi Konsumen pertama atau pelopor di daerah DKI Jakarta yang diberi nama "Koperasi TAMARA (Koperasi Wanita Mandiri Sejahtera)" serta melakukan pembinaan secara berkala terhadap Koperasi tersebut, dimana seluruh elemen yang terlibat di dalamnya adalah para wanita

Kata kunci: Inkubasi Bisnis, Ekonomi Kelembagaan, Koperasi TAMARA, dan KPM

ABSTRACK

PKH encourages KM to have access to basic social services of health, education, food and nutrition, and other protection programs. However, the results of this program are still far from expected. The Ministry of Social Affairs through the collaboration between the Central Jakarta Social Service Office and the Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA University has started its first step with the theme "Counseling Family Development" and delivered the material "Financial Governance for Beneficiary Families (KPM) of the Family Hope Program (PKH) Senen District". The author gets a fact that turns out to be different. Of the 899 KPM invited, only 47 KPM attended. Most of them admitted that the social assistance funds received were used for consumptive purposes (not in accordance with the designation set by the Government Program). The PKH Facilitator of Senen District responded to the author's idea and asked the author and the FEB UHAMKA team to initiate the birth of the first or pioneer Consumer Cooperative in the DKI Jakarta area named "Koperasi TAMARA (Koperasi Wanita Mandiri Sejahtera)" and conduct regular guidance on the Cooperative, where all elements involved in it are women.

Keywords: Business Incubation, Institutional Economics, TAMARA Cooperative, and KPM

PENDAHULUAN

Selama Orde Baru, kelompok-kelompok tertentu secara khusus terpengaruh oleh kapitalisme. Dalam kaitannya dengan kekuasaan sosial dan politik, Soeharto berfokus pada ciri-ciri sistem hirarkis dan mengeksploitasi kekuasaan negara untuk mengucilkan dan menekan kepentingan tertentu. Imperialisme modern adalah bentuk lanjutan dari kapitalisme dengan tujuan mempercepat kemajuan ekonomi dan budaya. Rezim Soeharto tampak sebagai rezim oligarki dengan bentuk pemerintahan yang otoriter di mana kelas atas membuat kebijakan yang mengeksploitasi kelas bawah. Sebagai contoh, Soeharto memanfaatkan arus masuk modal yang signifikan untuk keuntungannya sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan membanjirnya para pedagang Cina, yang jelas-jelas menguntungkan Soeharto. Tanpa adanya keterbukaan dari Direktorat Kehutanan, kelompok pengusaha Cina ini dapat memenangkan tender untuk 61 juta hektar hutan (Robinson & Hadiz, 2004).

Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada investor asing untuk memperluas operasi mereka di Indonesia. Meskipun hal ini memiliki keuntungan jangka pendek bagi Indonesia, hal ini akan memberikan dampak negatif jangka panjang karena perekonomian negara akan terus didominasi oleh investor asing. Tambang Freeport di Papua adalah contoh nyata. Meskipun memiliki sumber daya tambang yang kaya, masyarakat Papua tetap tidak berpendidikan, terbelakang, dan miskin. Inflasi dan krisis keuangan pada tahun 1997-1998 menunjukkan betapa buruknya struktur politik dan ekonomi Indonesia yang oligarkis. Setelah era Orde Baru berakhir pada tahun 1998 dan era Reformasi dimulai, sikap masyarakat Indonesia terhadap kapitalisme tidak mengalami perubahan yang signifikan (www.investor.co.id, 2013). Provinsi DKI Jakarta adalah tempat di mana sebagian besar uang yang beredar di Indonesia tersebar. Namun demikian, situasi saat ini diyakini tidak dapat mengatasi masalah-masalah seperti inefisiensi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Salah satu masalahnya adalah kegagalan dalam mempraktekkan konsep pembangunan yang disebut trickle-down effect.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan banyak upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di ibu kota, namun belum ada yang berhasil. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia telah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007, yang merupakan program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. PKH didirikan dengan tujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Program Perlindungan Sosial, yang juga dikenal sebagai Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfers/CBT) secara internasional, telah terbukti cukup berhasil dalam mengentaskan kemiskinan di banyak negara, terutama kemiskinan yang persisten. Sesuai dengan Nawacita Presiden Indonesia dan kewajiban konstitusional, program bantuan sosial bersyarat PKH memungkinkan keluarga berpenghasilan rendah, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan di sekitar mereka. Inklusi lansia dan penyandang disabilitas juga didorong sambil mempertahankan kesejahteraan sosial PKH.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses berkelanjutan ke dan menggunakan

layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, gizi, perawatan, dan bantuan. KM juga didorong untuk memiliki akses ke banyak program perlindungan sosial lainnya sebagai inisiatif tambahan. Tujuan PKH adalah untuk menjadi pusat nasional dan pusat keunggulan untuk inisiatif perlindungan sosial dan pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. PKH merupakan tujuan penting untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, di mana masih terdapat 28,01 juta orang miskin, atau 10,86% dari total populasi Indonesia. Menurut RPJMN 2015-2019, pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkirakan akan meningkat sebagai hasil dari PKH, sementara rasio gini dan jumlah penduduk miskin diperkirakan akan turun. Menurut penelitian sebelumnya, PKH mengubah konsumsi rumah tangga, seperti halnya di negara-negara lain yang menggunakan CCT. Konsumsi rumah tangga yang menguntungkan di Indonesia telah meningkat sebesar 4,8% sebagai hasil dari PKH. Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga
 - a. Reguler : Rp. 550.000,- /keluarga/tahun
 - b. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- /keluarga/tahun
2. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH
 - a. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
 - b. Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
 - c. SD : Rp. 900.000,-
 - d. SMP : Rp. 1.500.000,-
 - e. SMA : Rp. 2.000.000,-
 - f. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
 - g. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga

(Sumber: www.pkh.kemsos.go.id)

Fakta di lapangan yang kami temui sendiri di saat kami diundang oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini Pendamping PKH Kecamatan Senen dalam acara “Counseling Family Development” untuk menyampaikan materi “Tata Kelola Keuangan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Senen” pada 28 Januari 2019 lalu, sangat berbeda. Dari 899 Keluarga Penerima Manfaat seterusnya disebut KPM yang diundang, hanya 47 KPM saja yang hadir. Setelah penulis tanyakan satu per-satu, ternyata 47 KPM tersebut mengakui bahwa mereka selama ini rata-rata menghabiskan Bantuan Sosial PKH tersebut untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif seperti membeli sembako, baju, kosmetik, jajanan pasar, dll (tidak sesuai dengan peruntukan seperti yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial –pen). Sebelum penulis memulai penyampaian materi, Pendamping PKH mengingatkan sekaligus menekankan bahwa urgensi daripada acara tersebut adalah menimbulkan kesadaran para KPM untuk dapat mengalokasikan Bantuan Sosial PKH tersebut

menjadi sebuah modal kerja yang produktif dalam wujud kegiatan kewirausahaan (UMKM).

MASALAH

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dapat kami tarik simpulkan 4 (empat) masalah khusus yang dihadapi oleh para KPM PKH Kecamatan Senen ini, antara lain:

- 1) Peruntukan bantuan Dana Sosial PKH yang relatif masih dialokasikan untuk fungsi konsumsi dan bukan bersifat produktif.
- 2) Keterbatasan SDM para masyarakat penerima dana bantuan PKH dalam membuat, merumuskan, dan/atau merencanakan sebuah usaha atau kelompok usaha yang dapat menambah income mereka.
- 3) Urgensi untuk mewujudkan Koperasi TAMARA sebagai salah satu bentuk wadah Ekonomi Kelembagaan yang dapat merubah perilaku konsumtif para KPM serta dapat mewedahi mereka dalam membentuk / melakukan kegiatan usaha nantinya ke depan.
- 4) Keterbatasan pemahaman sekaligus pengetahuan para KPM Kecamatan Senen dan Pendamping PKH terkait Tata Kelola Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek Manajemen Pemasaran, Aspek Manajemen Keuangan dan Accounting, Aspek Perpajakan, Aspek Bisnis dan Ekonomi, Aspek Legal (Hukum), dan Aspek Penerapan Teknologi (IT) pada proses pengelolaan dan pengembangan Koperasi ke depannya.

METODE

Pendekatan yang kami lakukan untuk proyek pengabdian masyarakat ini tidak berorientasi pada hasil. Ada 2 (dua) skala prioritas yaitu output dan outcome yang digunakan untuk menyelaraskan hasil dari kegiatan ini. Hasil langsung atau segera dari berbagai kegiatan pengabdian, termasuk kegiatan dan program, yang kami lakukan selama Pengabdian Masyarakat ini diterjemahkan sebagai output dalam model Pengabdian Masyarakat ini. Dengan kata lain, luaran adalah dampak atau hasil jangka pendek yang dapat diamati. Ringkasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Output dan Outcome Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Output	Outcome
1	Membangun serta merubah <i>mindset</i> KPM Kecamatan Senen dalam pemanfaatan Dana Hibah PKH yang semula bersifat konsumtif kemudian memiliki kesadaran dan keinginan untuk mengalokasikannya menjadi modal kerja yang produktif dengan melaksanakan kegiatan yang tidak saja <i>entrepreneurship</i> melainkan <i>social entrepreneurship</i> guna meningkatkan kualitas hidup mereka	Adanya peningkatan / pertumbuhan penghasilan KPM Kecamatan Senen secara <i>real</i> per-bulannya dari kegiatan <i>social entrepreneurship</i> yang mereka lakukan, dibarengi dengan pertumbuhan dana sosial pada Kecamatan Senen tersebut. Karena hasil <i>social entrepreneurship</i> tersebut akan dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan Islam.

	dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.	
2	Mampu menggugah kesadaran serta minat atau niat berkoperasi bagi KPM Kecamatan Senen lainnya yang tidak ikut serta dalam Koperasi TAMARA ini nantinya.	Adanya peningkatan / pertumbuhan jumlah anggota Koperasi TAMARA ini nantinya yang dapat ditargetkan lebih kurang 3 (tiga) – 6 (enam) bulan ke depan terhitung sejak Koperasi tersebut didirikan.
3	Mampu merangsang daya kreativitas serta inovasi para KPM Kecamatan Senen dalam menghasilkan maupun mengembangkan produk-produk kewirausahaan lainnya sebagai tambahan portofolio produk konsumsi Koperasi TAMARA.	Adanya peningkatan / pertumbuhan jumlah produk Koperasi yang sifatnya lebih kepada kebaruan dan kompetitif untuk dipasarkan yang dapat ditargetkan kurang lebih selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Koperasi tersebut didirikan.
4	Dapat melibatkan para mahasiswa khususnya mahasiswa UHAMKA dari fakultas apapun untuk belajar berkoperasi sekaligus membantu mengembangkan Koperasi tersebut (praktek) dengan bekal akedemis yang telah mereka peroleh selama berada di bangku perkuliahan (teori).	Adanya keterlibatan / keikutsertaan mahasiswa khususnya Mahasiswa FEB UHAMKA bisa melalui kegiatan pemberian materi melalui Seminar Rutin Bulanan, melalui Program Praktek Magang Fakultas, maupun penelitian Tugas Akhir. Hal ini dapat ditargetkan lebih kurang 1 (satu) – 3 (tiga) orang Mahasiswa FEB UHAMKA untuk kegiatan tersebut selama 1 (satu) – 3 (tiga) bulan ke depan terhitung sejak Koperasi tersebut didirikan.

Adapaun langkah-langkah solusi yang ditawarkan agar poin (1) dan poin (2) pada luaran hasil kegiatan tersebut di atas dapat berjalan optimal, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi serta koordinasi yang intens (berkelanjutan) dengan Pendamping PKH Kecamatan Senen yang notabene selalu “bersentuhan” langsung dengan keseharian para KPM tersebut, guna mengetahui kondisi kekinian terkait masalah-masalah apa saja yang ditemui dalam aktivitas kewirausahaan mereka dalam berkoperasi.
2. Mengatur waktu pertemuan dengan Pendamping PKH Kecamatan Senen untuk merekonsiliasi gagasan baru yang bersifat solutif, kemudian menjadwalkan dan menentukan tema/materi Seminar Rutin Bulanan yang akan dilaksanakan dan di sampaikan kepada para KPM Kecamatan Senen tersebut.
3. Melaksanakan (mengekseskusi) Seminar Rutin Bulanan dengan waktu yang telah disepakati, jika memungkinkan dengan Anggaran yang tersedia maka akan kami alokasikan dana untuk mendatangkan Pemateri Ahli/Pakar yang memiliki kompetensi lebih untuk dapat memberikan “warna baru” pada seminar tersebut.
4. Memberikan motivasi dan mengajari para KPM Kecamatan Senen tersebut terkait seni

mempersuasi teman-teman KPM lainnya agar dapat ikut berpartisipasi - mengambil bagian menjadi anggota Koperasi dengan menawarkan hasil/manfaat positif yang real dapat mereka rasakan langsung dan dapat menambah income bulanan mereka secara terus menerus.

5. Membuka sesi tanya-jawab serta diskusi terkait kondisi real yang tengah dihadapi oleh para KPM tersebut dan meminta feedback terhadap teori/materi yang telah disampaikan.
6. Mengkoreksi kekeliruan-kekeliruan apa saja yang ada kemudian memberikan solusi dan membangun mindset baru untuk mengaplikasikan apa yang sudah diterima oleh KPM tersebut pada saat seminar/diskusi tersebut berlangsung.
7. Merumuskan hasil yang disepakati.
8. Menetapkan skala indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan rumusan yang telah disepakati tersebut.
9. Melakukan evaluasi maksimal 3 (tiga) bulan berikutnya setelah program tersebut berjalan. Adapaun langkah-langkah yang dapat dicapai agar poin (3) dan poin (4) pada luaran hasil kegiatan tersebut di atas dapat berjalan optimal, maka langkah-langkah strategis yang dapat kami lakukan adalah sebagai berikut: Meminta data kepada mitra terkait kondisi laporan keuangan, dan SDM maupun kondisi pencatatan keuangan lainnya yang real sudah terjadi terhadap usaha yang sudah dilakukan selama ini.
 1. Melakukan fungsi controlling bulanan ke lokasi Koperasi agar dapat melihat langsung perkembangan serta kondisi terkini terkait kegiatan kewirausahaan yang telah dijalankan oleh para KPM Kecamatan Senen dengan mengikut sertakan Mahasiswa FEB UHAMKA sebagai bentuk implementasi tugas belajar lapangan dari Mata Kuliah “Koperasi dan Kewirausahaan” dan Mata Kuliah “Rancangan Bisnis”.
 2. Melakukan diskusi (dengan membuka sesi tanya-jawab) terkait kendala-kendala apa saja yang tengah mereka hadapi, dengan didahului pembuatan angket pertanyaan (kuesioner) baik pertanyaan terbuka maupun tertutup yang telah didesain sebelumnya oleh para Mahasiswa FEB UHAMKA.
 3. Menjadwalkan ulang kembali pertemuan dengan para KPM tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu dengan membawa kembali hasil (solusi) terhadap kendala-kendala yang tentunya sudah melalui proses problem solving secara teoritis di dalam kelas (formal) maupun diskusi di luar kelas (informal) antara kami dengan para Mahasiswa tersebut.
 4. Mensosialisasikan hasil rumusan masalah yang telah dibahas di kampus kepada para KPM tersebut melalui forum Seminar Rutin Bulanan dengan kolaborasi kami dengan para Mahasiswa tersebut.
 5. Membuka sesi tanya-jawab serta diskusi terkait kondisi real yang tengah dihadapi oleh para KPM tersebut dan meminta feedback terhadap teori/materi yang telah disampaikan.
 6. Mengkoreksi kekeliruan-kekeliruan apa saja yang ada kemudian memberikan solusi dan membangun mindset baru untuk mengaplikasikan apa yang sudah diterima oleh KPM tersebut pada saat seminar/diskusi tersebut berlangsung.
 7. Merumuskan hasil yang disepakati.

8. Menetapkan skala indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan rumusan yang telah disepakati tersebut.
9. Melakukan evaluasi maksimal 3 (tiga) bulan setelah program tersebut berjalan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis (13/02/2020) di Aula Kecamatan Senen (Jl. Kramat III No.31) sekaligus diadakannya Acara Rapat Pendirian Koperasi Wanita Mandiri Sejahtera (TAMARA), alhamdulillah berjalan lancar dan sukses serta optimisme yang tinggi dari Ibu-Ibu Rumah Tangga akan terbentuknya Koperasi tersebut. Sesuai dengan metode pengampingan yang kami bawakan yaitu exploration dengan Sharing of Idea menghasilkan berbagai macam tumpahan ide untuk mewujudkan Koperasi ini.



Gambar 1. Sosialisasi Inkubasi Bisnis dan Ekonomi Kelembagaan oleh Pemateri

Adapun hasil kegiatan pada acara sosialisasi serta rapat pendirian koperasi tersebut, di samping menetapkan Susunan Pengurus dan Susunan Pengawas, juga berhasil menetapkan 3 klasifikasi usaha pada Koperasi TAMARA ini nantinya, antara lain:

1. Usaha Utama: Jasa Boga untuk suatu event tertentu
2. Usaha Pendukung:
 - a) Industri Produk Roti dan Kue
 - b) Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
 - c) Industri Pengelolaan Es Krim
 - d) Industri macaroni, mie dan produk sejenis
 - e) Industri pengolahan teh
 - f) Industri makanan dan masakan olahan
 - g) Industri kue basah
 - h) Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau

tembakau bukan disupermarket/minimarket (tradisional)

3. Usaha Tambahan:

- a) Unit Usaha Simpan Pinjam Konvensional
- b) Pendidikan Lainnya Swasta
- c) Event organizer
- d) Industri makanan bayi
- e) Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
- f) Aktivitas Binatu
- g) Aktivitas SPA

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT serta rasa haru dan rasa puas terhadap lelah mondar-mandir lebih kurang 2 tahun terbayarkan sudah. Jawabannya ada pada kegiatan Program Kemitraan kali ini. Akte Notaris Pendirian Koperasi TAMARA menjadi salah satu jawaban istiqomahnya kami yang dimulai sejak 2018 lalu bersama 6 orang tim dosen UHAMKA (2 orang tim dosen FEB dan 2 orang tim dosen FKIP).

Tentu bukan saja menjadi luaran yang cukup membanggakan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini, tapi menjadi luaran yang sangat bermanfaat untuk para Ibu-Ibu Rumah Tangga yang berlokasi di Kecamatan Senen. Karena dengan adanya legalitas formal Koperasi ini, aktivitas mereka dapat terwadahi dengan optimal harapannya ke depan. Dengan wadah yang sudah berbadan hukum ini ekspansi usaha dan penetrasi pasar menjadi sebuah peluang jika mampu dioptimalkan dan dibidik dengan cermat. Tidak berhenti di sana, tentu saja ini akan menjadi “pekerjaan rumah” berikutnya kami para tim dosen UHAMKA bersama-sama dengan Pendamping KPM PKH beserta KPM PKH (anggota Koperasi TAMARA/Ibu-Ibu Rumah Tangga) untuk menjamin keberlangsungan jalannya Koperasi tersebut, khususnya optimalisasi terhadap pemanfaatan dana bantuan Pemerintah kepada para KPM PKH tersebut. Jauh lebih penting daripada itu, adalah menjamin kemandirian mereka di saat batas/jangka waktu dana tersebut dihentikan oleh Pemerintah.



Gambar 2. Cover Depan Akta Notaris Pendirian Koperasi TAMARA

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian di atas sebenarnya memulai bisnis online tidaklah sulit. Ternyata terbukti untuk kesekian kali, memang “mengabdikan itu tidak seindah berwacana”. Wacana tidak akan mampu mendeterminasi masalah-masalah sosial-ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berpikir, bekerjasama, dan bertindak merupakan modal dasar yang kami miliki dalam memulai ini semua di awal tahun 2018 lalu. Di mulai dengan kolaborasi kegiatan Program Kemitraan Masyarakat lintas Fakultas (FKIP – FEB), dilanjutkan dengan harus bolak-balik ke Aula Kecamatan Senen untuk menyampaikan materi sebagai modal sekaligus pembekalan dari sisi pengetahuan bagi para KPM PKH, disambung dengan kembali dengan kegiatan Program Kemitraan tahun 2019 merupakan serangkaian bentuk istiqomah kami untuk mengabdikan diri (pemikiran, waktu, tenaga, dan biaya) kepada masyarakat.

Akte Notaris Pendirian Koperasi TAMARA merupakan salah satu luaran yang memotivasi kami untuk terus membina Koperassi ini nantinya ke depan. Surat Keputusan (SK) Kemenkumham, insyaallah akan menjadi jawaban pada kegiatan Program Kemitraan Masyarakat selanjutnya, ditambah lagi dengan “pekerjaan-pekerjaan rumah” yang sudah menunggu untuk pengembangan Koperasi ini ke depannya.

Minimnya pengetahuan berbisnis, tata kelola keuangan, serta tata kelola perkoperasian merupakan beberapa deretan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar memudahkan anggota tersebut melakukan aktifitas usaha, operasional maupun administrasi. Hal ini dibuktikan, dari sekian banyak aktifitas usaha yang sudah ditetapkan, hanya baru optimal 30%-nya saja, sisanya masih dalam fase stagnasi. Problematika pengaturan keuangan rumah tangga para KPM PKH yang dihadapkan dengan sejumlah daftar kebutuhan (tuntutan) hidup menjadi masalah klasik yang harus segera dicarikan solusinya.

SARAN

Mengingat banyaknya tumpukan pekerjaan rumah yang menanti dalam pengembangan Koperasi TAMARA, khususnya dalam hal ekspansi usaha dan penetrasi pasar, maka kami sangat membutuhkan tambahan amunisi, riil maupun in-materiil. Riil, kami membutuhkan kolaborasi pemikiran-pemikiran dari berbagai perspektif teman-teman dosen UHAMKA pada seluruh cabang keilmuan, karena hal ini memungkinkan bagi Koperasi untuk dapat menyentuh angle lainnya yang belum tersentuh tentunya. Di samping itu, ketersediaan alokasi anggaran menjadi faktor pendukung untuk memudahkan kami melakukan take-off ide-ide yang akan di lending-kan dalam bentuk kegiatan.

Skema kerjasama antara Koperasi TAMARA dengan UHAMKA (dalam hal ini di-linkage-kan dengan LPPM UHAMKA) menjadi hal yang urgent menurut kami. Karena di samping memenuhi tuntutan akademik, menjadi sangat relevan bagi UHAMKA untuk memiliki sebuah Koperasi yang dihasilkan dari karya Program Kemitraan Masyarakat pada kegiatan LPPM UHAMKA, sekaligus sebagai laboratorium perkuliahan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan ajar (kuliah lapangan) yang ada relevansinya pada seluruh fakultas yang ada di UHAMKA, tentu melalui sebuah prosedur teknis yang dibuatkan oleh LPPM UHAMKA terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2016. Statistik Indonesia Tahun 2015. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik
<http://www.investor.co.id/home/papua-antara-freeport-dan-impian-tanah-surga/60012>, diakses tanggal 12 Mei 2014.
<http://www.pkh.kemsos.go.id>
Robinson, Richard dan Hadiz, Vedi R. (2004). "The Genesis of Oligarchy: Soeharto's New Order 1965-1982", dalam *Reorganising Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, New York: Routledge Curzon, pp. 136-167.